

**ANALISIS PEMERATAAN PENDAPATAN  
PADA USAHA TERNAK SAPI PERAH RAKYAT  
(Survey pada Peternakan Sapi Perah Rakyat di Kabupaten Bandung)**

Sri Rahayu, Dadi Suryadi dan Sondi Kuswaryan  
Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran  
Jatinangor, Bandung 40600

**ABSTRAK**

Usahaternak sapi perah adalah salah satu bidang usaha pada sub sektor peternakan yang sangat potensial untuk terus dipacu perkembangannya. Namun demikian, karena adanya perbedaan penguasaan sumberdaya produktif diantara peternak, diduga menyebabkan terjadinya ketidak merataan perolehan pendapatan diantara mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran ketidak merataan perolehan pendapatan pada usahaternak sapi perah rakyat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Obyek penelitian ini adalah peternak sapi perah rakyat sebanyak 122 orang peternak yang merupakan anggota dari KUD Tani Mukti Kecamatan Ciwidey sebanyak 57 orang, KPSBU Kecamatan Lembang sebanyak 38 orang dan KUD Sarwa Mukti Kecamatan Cisarua sebanyak 27 orang, yang dipilih dengan cara acak berstrata (*Stratified Random Sampling*), berdasarkan tingkat kepemilikan sapi produktif. Data yang dihimpun dianalisis dengan menggunakan ukuran koefisien Gini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Mayoritas peternak memiliki ternak sapi perah dengan skala pemilikan sedikit (2-3 ekor induk).
2. Rata-rata pendapatan peternak per bulan di Kecamatan Ciwidey strata I Rp. 624.226 , strata II Rp. 1.049.700 dan strata III Rp. 1.288.284. Rata-rata pendapatan peternak per bulan di Kecamatan Lembang Strata I Rp. 409.555 , strata II Rp. 847.456 dan strata III Rp. 1.447.343. Rata-rata pendapatan peternak per bulan di Kecamatan Cisarua Strata I Rp. 598.458, strata II Rp. 1.320.394 dan strata III Rp. 1.886.296.
3. Ukuran Koefisien Gini usahaternak sapi perah rakyat di Kecamatan Ciwidey sebesar 0,0787 ; di Kecamatan Lembang 0,2472 dan di Kecamatan Cisarua 0,2398.

Untuk mengurangi/menahan ketimpangan pendapatan, kebijakan penyebaran ternak sebaiknya diberikan kepada peternak dengan skala pemilikan kecil.

**Kata kunci :** Pemerataan pendapatan, Usaha ternak sapi perah

## AN ANALYSIS OF INCOME DISPARITY OF DAIRY FARM

### ABSTRACT

Dairy farm is one of the potential sectors on agroindustry. The farm sectors have not contributed enough income to the holders. The farm size is too small to operate the bussiness efficiently. The average herd size are 2-3 animal units per farmer. The purpose of the study is to identify income disparity of dairy farmer and the related factors of the parameters. Observation units are dairy farmers, members of Tani Mukti KUD at Ciwidey, KPSBU at Lembang and Sarwa Mukti KUD at Cisarua Districts. The sample choosed by Stratified Random Sampling based on dairy cattle ownership. The number of sample is 122 farmers. They consisted of 57 , 38 and 27 farmers as members of each location. Data consisted of secondary and primary data. The data is analized by Gini Coefficient measurement. The result showed that:

1. The majority of dairy cattle ownership is 2-3 animal units per farmer.
2. In Ciwidey district, the average of dairy farmer income per month on the strata I were Rp.624,226 , strata II Rp.1,049,700 and strata III Rp.1,228,343. In Lembang district, the average of dairy farmer income per month on the strata I were Rp.409,555 , strata II Rp.847,456 and strata III Rp.1,447,343. In Cisarua district, the average of dairy farmer income per month on the strata I were Rp.598,458 , strata II Rp.1,320,394 and strata III Rp.1,886,296.
3. The Gini Coefficient of Ciwidey, Lembang and Cisarua district were 0.0787; 0.2472; and 0.2398 respectively.

To reduce of the disparity income distribution of dairy farmer, the government policy on dairy herd distribution is suggested to small farms.

**Keywords :** Income dioparity, dairy farm.

### PENDAHULUAN

Salah satu jenis usaha pada sub sektor peternakan yang potensial untuk terus dipacu perkembangannya adalah usaha ternak sapi perah. Hal ini didukung melimpahnya sumberdaya lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai input produksi, serta tingginya harga susu impor, sehingga susu produksi di dalam negeri (peternakan rakyat) mempunyai kesempatan untuk berperan dalam upaya mensubstitusi impor susu dan penghematan devisa.

Dalam pembangunan sektor pertanian, penguasaan terhadap sumber-sumber produksi sering menjadi penyebab tidak meratanya pendapatan di kalangan petani, karena mereka yang mempunyai kekayaan produktif yang tinggi seperi lahan, modal dan kedekatan dengan pengambil keputusan di masyarakat mempunyai akses yang baik terhadap sumber-sumber ekonomi, sedangkan mereka yang tidak memiliki kekayaan produktif tinggi sulit

memperoleh akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Gejala ini terlihat pula dalam struktur usahaternak sapi perah rakyat. Sebagian besar usahaternak sapi perah rakyat hanya memelihara 2-3 ekor per unit usaha, serta tidak memperoleh dukungan yang cukup dari faktor produksi lainnya, khususnya penguasaan lahan. Sebagian kecil unit usaha lainnya mempunyai skala usaha yang relatif besar, disertai dengan pemilikan lahan yang luas serta akses yang cukup terhadap sumber ekonomi. Akibatnya unit usahaternak sapi perah skala kecil menjadi sangat sulit untuk berkembang menjadi besar serta berpengaruh pula terhadap ketimpangan perolehan pendapatan di kalangan peternak.

Upaya mengetahui ukuran ketidakmerataan pendapatan pada usaha ternak sapi perah rakyat dirasakan sangat penting, karena terkait dengan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Mengingat kepentingan tersebut, penelitian ini dilaksanakan.

### **PERUMUSAN MASALAH**

Pada peternakan sapi perah rakyat penguasaan faktor produksi, khususnya penguasaan ternak produktif serta lahan usaha masih sangat terbatas dan timpang, padahal hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan usaha dan pemerataan perolehan pendapatan. Perbedaan penguasaan faktor produksi dan akses ke sumber ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, sehingga menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Hal ini ditandai oleh pengkon-sentrasian pada tingkat pendapatan tinggi, sementara sebagian besar peternak lainnya memperoleh distribusi pendapatan yang rendah.

Dari uraian tersebut, dapat disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar tingkat pendapatan dari usaha ternak sapi perah pada berbagai skala usahaternak sapi perah rakyat.
2. Berapa besar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi pada usahaternak sapi perah rakyat.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pembicaraan mengenai isu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan. Fakta yang ada dalam kaitannya dengan pembangunan di Indonesia, sejak Pelita I terlihat strategi pembangunan Indonesia tetap bertumpu pada aspek pertumbuhan (*growth* bukan *equity*) dan saat ini, khususnya sejak krisis ekonomi, strategi pembangunan seperti ini mulai dipermasalahkan.

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Schikele (1954) menyatakan bahwa distribusi pendapatan yang optimum dicapai jika seseorang mempunyai akses terhadap kecukupan standar minimum, serta mempunyai penghasilan di atas tingkat hidup sepadan.

Struktur ekonomi pada akhir pemerintahan orde baru berada pada keadaan transisional yang beralih dari struktur agraris ke industri; dimana aspek keberhasilan pembangunan cenderung diukur dengan menggunakan tolok ukur pendapatan yaitu *Gross National Product* atau GNP/kapita. Ukuran ini sebenarnya belum cukup untuk menilai prestasi pembangunan suatu negara, karena pendapatan per kapita menggunakan konsep rata-rata sehingga tidak mencerminkan bagaimana pendapatan dibagi di kalangan penduduknya (Budiman, 2000). Pengalaman di berbagai negara dinyatakan oleh Todaro (1993) bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi sedikit sekali membawa manfaat bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu pembangunan ekonomi masyarakat harus dalam kerangka pencapaian *maximum social product (national income)* dan *optimum income distribution*.

Menurut Schikele (1954), tingkat distribusi pendapatan yang optimum tidak mensyaratkan adanya pembagian pendapatan yang harus sama bagi setiap individu. Kebijakan distribusi pendapatan dapat dicapai dengan baik melalui kondisi: kesamaan memperoleh kesempatan (*equality of opportunity*), kebebasan berekspresi bagi setiap individu (*individual freedom of self-expression*) serta adanya penghargaan yang baik terhadap martabat manusia (*human dignity are served the best*). Selanjutnya dinyatakan bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda dalam memperbaiki distribusi pendapatan. Kebijakan yang umum pada sektor pertanian adalah alokasi sumberdaya bagi petani berpendapatan rendah, dalam arti perbaikan distribusi pendapatan untuk membantu penghasilan keluarga melalui peningkatan kapasitas penerimaan dan efisiensi produksi dengan cara menyediakan sumberdaya produktif sesuai kebutuhan petani.

Ukuran yang biasa digunakan untuk mengestimasi tingkat pemerataan distribusi pendapatan adalah nilai Koefisien Gini (Widodo, 1990). Selanjutnya menurut Sadikin (1992), penyebab terjadinya penyebaran pendapatan yang relatif sangat timpang pada usahaternak adalah rendahnya skala usaha (tingkat produksi), rendahnya penguasaan modal kapital dan penguasaan pemakaian teknologi yang relatif masih sangat sederhana.

Kontribusi usahaternak sapi perah terhadap perekonomian nasional terlihat dari *net economic benefit* yang positif, serta adanya penghematan devisa untuk setiap liter susu yang dihasilkan di dalam negeri, secara finansial membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat peternak (Kuswaryan, 1992). Semua manfaat yang diraih dalam usahaternak sapi perah sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi susu yang dihasilkan.

Tinggi rendahnya produksi susu dalam usahaternak sapi perah sangat erat kaitannya dengan jumlah ternak dan struktur populasi sapi yang dipelihara, makin banyak jumlah ternak produktif yang dipelihara maka pendapatan yang diperoleh akan makin besar (Dasuki, dkk. 1977). Oleh karena itu skala usaha harus terus didorong untuk mencapai tingkat skala usaha ekonomis (Saragih, 1994). Operasionalisasi peningkatan skala usaha dapat mengikuti saran Soehaji (1992) dengan mendorong peternakan sebagai usaha sambilan (pendapatan dari

usahaternak kurang dari 30%), terus ke cabang usaha (pendapatan dari usahaternak 30 -70%), usaha pokok (pendapatan dari usahaternak 70 -100%) sampai ke usaha industri (tingkat pendapatan 100%, usaha peternakan sebagai komoditas pilihan).

Pada usahaternak sapi perah rakyat, pemilikan lahan bukan merupakan faktor penentu berlangsungnya usaha, karena pada kenyataannya, pada sebagian besar peternak, lahan hanya dibutuhkan untuk tempat berpijak kandang (Rahayu, dkk., 1996). Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemajuan perkembangan usahaternak sapi perah rakyat adalah ketersediaan sumberdaya manusia dalam keluarga, serta kualitas sumberdaya manusia, biasanya dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman berusahaternak.

### **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini ditujukan untuk:

1. Mengetahui tingkat pendapatan dari usahaternak sapi perah pada berbagai skala usahaternak sapi perah rakyat.
2. Mengetahui sejauhmana ketimpangan distribusi pendapatan pada usahaternak sapi perah rakyat.

### **MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambilan keputusan, khususnya pemerintah, koperasi peternakan sapi perah, Dinas Peternakan dan atau instansi lain yang terkait, dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan bagi kalangan peternak sapi perah rakyat di pedesaan.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Penentuan Daerah dan Objek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah usahaternak sapi perah rakyat anggota KUD Tani Mukti Kecamatan Ciwidey; KPSBU Lembang dan KUD Sarwa Mukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung, yang dipilih dengan cara *Stratified Random Sampling*. Ukuran contoh ditentukan menurut saran Parel, dkk. (1973) menggunakan metode pengalokasian proporsional (*Proportional Allocation Method*). Jumlah dan sebaran responden peternak dari masing-masing daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Jumlah Responden Penelitian dari KUD Tani Mukti, KPSBU dan KUD Sarwa Mukti.

No	Strata Pemilikan	KUD Tani Mukti		KPSBU		KUD Sarwa Mukti	
		(Org)	(%)	(Org)	(%)	(Org)	(%)
1	1 – 3 ekor (S <sub>1</sub> )	50	87,72	18	47,37	18	66,67
2	4 – 6 ekor (S <sub>2</sub> )	5	8,77	15	39,47	6	22,22
3	> 6 ekor (S <sub>3</sub> )	2	3,51	5	13,16	3	11,11
	Jumlah	57	100	38	100	27	100

**Keterangan:** Pembagian strata didasarkan pada jumlah pemilikan sapi perah produktif.

### Perhitungan Koefisien Gini (Gini Ratio)

Ketimpangan distribusi pendapatan pada usahaternak sapi perah rakyat diidentifikasi menggunakan ukuran Koefisien Gini (Widodo, 1990):

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i) (Y_i - Y_{i+1})$$

Keterangan:

GC = Koefisien Gini

X<sub>i</sub> = proporsi jumlah peternak kumulatif dalam kelas ke i

Y<sub>i</sub> = proporsi jumlah pendapatan kumulatif dalam kelas ke i

Nilai koefisien Gini (*Gini Ratio*) berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Klasifikasi pemerataan pendapatan yang umum di negara berkembang adalah:

- Nilai Gini rasio lebih kecil dari 0,30 dikategorikan terjadi ketimpangan rendah.
- Nilai Gini rasio antara 0,30 sampai dengan 0,40 dikategorikan terjadi ketimpangan sedang.
- Nilai Gini rasio lebih besar dari 0,40 dikategorikan terjadi ketimpangan tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keadaan Usahaternak Sapi Perah

Dalam menjaga kelancaran usaha sepanjang tahun, maka struktur populasi dalam satu unit usahaternak, disarankan mempertahankan komposisi 70 persen sapi produktif dan 30 persen sapi non produktif atau 85 persen sapi laktasi dan 15 persen sapi kering kandang. Struktur populasi per unit usahaternak sapi perah di masing-masing lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Dari tabel tersebut, terlihat kecenderungan ternak non produktif lebih banyak pada skala kecil, dibandingkan dengan skala usaha yang lebih besar. Pada peternak skala besar penggantian ternak yang sudah tidak produktif (*replacement stock*) dilakukan dengan cara pembelian ternak produktif, bukan dengan cara pemeliharaan pedet, karena mereka menganggap memelihara sapi

**Analisis Pemerataan Pendapatan pada Usaha ternak Sapi Perah Rakyat (Sri Rahayu dkk.)**

muda atau pedet (sapi non produktif) merupakan beban bagi usahanya. Sedangkan pada peternak skala kecil memelihara pedet atau sapi muda terpaksa dilakukan karena terbatasnya dana yang dapat digunakan untuk membeli sapi pengganti.

**Tabel 2.** Struktur Populasi per Unit Usahaternak Sapi Perah

Kecamatan	Jenis Ternak	S <sub>1</sub>		S <sub>2</sub>		S <sub>3</sub>	
		ST	%	ST	%	ST	%
Ciwidey	Prod.	1,93	75,39	4,80	85,71	21,00	93,83
	Muda	0,48	18,75	0,80	7,14	0,75	3,35
	Pedet	0,15	5,86	1,60	7,14	0,63	2,82
Lembang	Prod.	0,81	61,36	4,40	87,13	7,20	89,44
	Muda	0,36	27,27	0,53	10,50	0,40	4,97
	Pedet	0,15	11,36	0,12	2,38	0,45	5,59
Cisarua	Prod.	2,06	81,10	4,67	84,76	10,33	69,66
	Muda	0,20	7,87	0,42	7,62	3,67	24,75
	Pedet	0,28	11,02	0,42	7,62	0,83	5,60

Secara kuantitas jumlah pakan yang diberikan pada unit usahaternak sapi perah di masing-masing daerah (Tabel 3) sudah mencukupi untuk mendukung tingkat produksi yang tinggi, namun kenyataannya rata-rata tingkat produksi masih belum maksimal.

**Tabel 3.** Struktur Pemberian Pakan di Berbagai Daerah

Kecamatan	Rata-rata Pemberian	% Hijauan	% Konsentrat
Ciwidey	17,30 Kg BK	58,29	41,71
Lembang	15,81 Kg BK	42,69	57,31
Cisarua	18,96 Kg BK	57,03	42,97

\*) Konsentrat : *pakan yang dibeli dari koperasi ditambah ampas tahu/onggok basah*

Diduga kualitas pakan yang diberikan masih lebih rendah dari standar kebutuhan sapi perah laktasi. Untuk melengkapi kekurangan tersebut, sebagian peternak menambahkan bahan pakan lain seperti dedak, ampas tahu, onggok serta mineral dan molases.

Untuk peternak di Kecamatan Ciwidey peningkatan kualitas pakan melalui peningkatan kualitas hijauan masih dimungkinkan dengan penanaman rumput unggul karena lahan masih relatif luas. Terbatasnya lahan yang mampu menghasilkan hijauan pakan di Kecamatan Lembang yang disebabkan oleh intensitas alih fungsi lahan yang tinggi, menyebabkan korbanan tenaga kerja untuk memperoleh hijauan pakan menjadi sangat besar (Kuswaryan, dkk., 2001).

Hal ini yang menyebabkan persentase konsentrat pemberiannya lebih besar dibandingkan dengan persentase hijauan. Kemampuan produksi pada masing-masing skala pemilikan di ketiga kecamatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Rata-rata Produksi Susu di Kecamatan Ciwidey, Lembang dan Cisarua. (Lt. Ek. Lak. /Hari)

Kecamatan	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	Rata-rata
Ciwidey	13,58	15,13	10,00	13,59
Lembang	17,35	14,01	12,80	14,76
Cisarua	15,07	13,07	13,23	14,42
Rata-rata	15.08	14.32	11.59	-

Secara umum tidak terlihat adanya perbedaan tingkat produksi yang mencolok di ketiga wilayah penelitian, namun terlihat kecenderungan besarnya skala usaha tidak diikuti oleh peningkatan produksi rata-rata per ekor laktasi. Pada skala usaha kecil pemeliharaan ternak lebih intensif bila dibandingkan dengan skala besar, karena pada umumnya jumlah tenaga kerja keluarga yang terlibat relatif sama. Hal ini memberikan indikasi lemahnya kualitas manajemen usahaternak. Oleh karena itu peningkatan skala usahaternak sapi perah rakyat harus disertai dengan upaya bagi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini kualitas manajemen usahaternaknya.

#### Keragaan Finansial Usahaternak Sapi Perah

Keragaan finansial usahaternak sapi perah sebagai hasil jerih payah peternak dalam mengelola usahanya dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5.** Struktur Biaya dan Pendapatan Usahaternak Sapi Perah

Kecamatan	Jenis Biaya	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>
		Rp/UU/bln	Rp/UU/bln	Rp/UU/bln
Ciwidey	Biaya Total	385.082	722.341	4.541.716
	Penerimaan	1.009.288	1.772.041	5.830.000
	Pendapatan	624.226	1.049.700	1.288.284
Lembang	Biaya Total	477.595	1.471.526	1.947.579
	Penerimaan	887.150	2.318.982	3.395.031
	Pendapatan	409.555	847.456	1.447.434
Cisarua	Biaya Total	496.623	938.250	3.052.926
	Penerimaan	1.095.081	2.258.644	4.939.222
	Pendapatan	598.458	1.320.394	1.886.296
Rata-rata Pendapatan		551.659	1.046.613	1.470.202

Nilai pendapatan yang diperhitungkan pada Tabel 5 merupakan *family income*, karena di dalamnya sudah tercakup korbanan peternak sebagai sumber tenaga kerja serta pengelola. Skala pemilikan ternak yang relatif lebih sedikit pada masing-masing strata di Kecamatan Lembang (Tabel 2) dibandingkan dengan daerah lainnya, menyebabkan rendahnya pendapatan per unit usaha di Kecamatan Lembang. Disamping itu besarnya biaya untuk pengadaan hijauan pakan turut memberikan tekanan pada pendapatan usahaternaknya.

Bila diperhitungkan untuk tiap unit ternak yang dipelihara, tingkat pendapatan peternak di Kecamatan Lembang relatif baik. Pendapatan per unit ternak yang dipelihara per bulan adalah sebesar Rp 243.838,28; Rp 145.791,67; Rp 57.564,08 masing-masing untuk strata I, II dan III di Kecamatan Ciwidey. Untuk Kecamatan Lembang adalah sebesar Rp 310.268,93; Rp 167.813,07 dan Rp 179.805,47, sedangkan untuk Kecamatan Cisarua adalah 235.613,39; Rp 239.635,93 dan Rp 127.194,61 masing-masing untuk strata I, II dan III.

Makin besar skala usaha, dibutuhkan kemampuan manajemen yang lebih baik, karena beban kerja akan makin berat, tenaga kerja keluarga tidak cukup lagi memenuhi tuntutan kebutuhan tenagakerja, khususnya untuk menyabit rumput atau tenaga pengelola di kandang. Tambahan tenaga kerja yang diupah pada skala usaha besar, menyebabkan adanya tambahan beban terhadap biaya variabel. Oleh karena itu, nilai pendapatan per unit ternak yang dipelihara pada strata besar relatif lebih rendah dibandingkan dengan strata lebih kecil.

### **Distribusi Pendapatan pada Usahaternak Sapi Perah Rakyat**

Capaian distribusi pendapatan pada masyarakat peternak sapi perah rakyat di daerah penelitian ditampilkan pada Tabel 6. Melihat nilai koefisien Gini pada Tabel 6, untuk ketiga daerah penelitian mempunyai ketimpangan yang rendah, ketimpangan yang paling kecil terjadi di Kecamatan Ciwidey, dengan Koefisien Rini sebesar 0,0787. Sedangkan untuk Kecamatan Lembang sebesar 0,2472 dan Kecamatan Cisarua sebesar 0,2398. Nilai koefisien Gini yang hampir sama sebesar 0,248 diperoleh Rahayu, dkk. (2000) untuk peternakan sapi perah rakyat di Kabupaten Tasikmalaya.

Pada peternak di Kecamatan Lembang, strata I sebanyak 47,4 persen memperoleh 26,98 persen pendapatan sedangkan strata II 39,5 persen peternak memperoleh 26,49 persen pendapatan. Fenomena yang sama terjadi pula di Kecamatan Cisarua. Perolehan pendapatan yang lebih besar dari proporsi peternaknya terlihat pada strata II dan III. Sedangkan untuk strata I, kejadiannya terbalik proporsi pendapatan yang kecil dibandingkan dengan jumlah (proporsi peternak) yang lebih besar. Dengan demikian terlihat ketimpangan di dua daerah ini, namun kategorinya masih rendah.

**Tabel 6.** Distribusi Pendapatan dan Koefisien Gini

Kecamatan	Jenis Biaya	Persentase Pendapatan	Persentase Peternak	Koefisien Gini
Ciwidey	Strata I	79,95	87,80	0,0787
	Strata II	13,45	8,80	
	Strata III	6,60	3,50	
Lembang	Strata I	26,98	47,40	0,2472
	Strata II	46,53	39,50	
	Strata III	26,49	13,20	
Cisarua	Strata I	44,23	66,70	0,2398
	Strata II	32,53	22,20	
	Strata III	23,24	11,10	

Dengan membandingkan Gini Rasio di ketiga kecamatan tersebut, tampaknya pemerataan pendapatan di Kecamatan Ciwidey relatif lebih baik dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya. Namun demikian satu hal perlu dicatat bahwa pemerataan pendapatan yang baik di kecamatan Ciwidey, bukan diperoleh dari unit usahaternak dengan skala ekonomi, tetapi masih pada skala kecil, sehingga pemerataan pendapatan disini tidak mencerminkan adanya gambaran yang jelas terjadinya perbaikan kesejahteraan kehidupan peternak. Melihat fenomena tersebut, norma yang paling ideal yang harus dicapai adalah terjadinya pemerataan perolehan pendapatan dari kegiatan usaha, dimana untuk tiap unit usahaternak sapi perah rakyat mempunyai skala pemilikan yang relatif besar, minimal setara dengan strata III. Dengan demikian upaya meningkatkan skala usahaternak sapi perah rakyat harus disertai dengan perhatian pihak pembina/koperasi supaya peningkatan skala usaha disertai dengan pemerataan pendapatan.

Dari pembahasan di atas tampak bahwa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antara peternak adalah, penguasaan faktor produksi terutama pemilikan ternak produktif, penguasaan lahan, dan tenaga kerja. Dengan hanya memiliki ternak produktif kurang dari 4 ekor, sulit mencapai produktivitas yang tinggi dan efisiensi penggunaan faktor produksi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Mayoritas peternak memiliki ternak sapi perah dengan skala pemilikan sedikit ( 2 – 3 ekor induk).
2. Rata-rata pendapatan peternak per bulan di Kecamatan Ciwidey Strata I Rp. 624.226,- ,strata II Rp. 1.049.700,- dan strata III Rp.1.228.284,-.

**Analisis Pemerataan Pendapatan pada Usaha ternak Sapi Perah Rakyat  
(Sri Rahayu dkk.)**

---

- Rata-rata pendapatan peternak per bulan di Kecamatan lembang strata I Rp. 409.555,- , strata II Rp. 847.456,- dan strata III Rp.1.447.343,-.  
Rara-rata pendapatan peternak per bulan di Kecamatan Cisarua strata I Rp.598.458,- ,strata II Rp. 1.320.394,- dan strata III Rp.1.886.296,-
3. Ukuran koefisien gini usahaternak sapi perah di Kecamatan Ciwidey sebesar 0,0787 ; di Kecamatan Lembang 0,2472 dan di Kecamatan Cisarua sebesar 0,2398.
  4. Pemerataan pendapatan pada usahaternak sapi perah rakyat di ketiga Kecamatan di Kabupaten Bandung berada pada ketimpangan rendah.

**Saran**

Untuk mengurangi dan menahan terjadinya ketimpangan pendapatan, kebijakan penyebaran bantuan ternak sapi perah baru hendaknya diberikan pada masyarakat peternak dengan skala pe-milikan kecil. Namun demikian kebijakan ini harus disertai dengan sistem pengendalian populasi yang ketat dalam wilayah kerja masing-masing koperasi, untuk menghindari penjualan sapi produktif, yang sering digunakan untuk kepentingan konsumtif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Budiman, A., 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kuswaryan, S., 1992. Keunggulan Komparatif Usahaternak Sapi Perah Rakyat Sebagai Upaya Substitusi Impor Susu. Tesis S2. Pascasarjana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Kuswaryan, S., I. Setiawan, U. Yunasaf dan H. Hadiana, 2001. Pra Studi Kelayakan Relokasi Sapi Perah. Kerjasama Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat dengan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Parel, C.P., G.C. Caldito, D.L. Perrerr, De Guzman, C.S. Sincioco, and R.H. Tan, 1973. Sampling Design and Procedures. The Agricultural Development Council. Singapore.
- Rahayu, S., S. Kuswaryan dan M.H. Hadiana, 1996. Ekonomi Insentif, Keunggulan Komparatif dan Distribusi Pendapatan pada Usahaternak Sapi Perah Rakyat dan Perusahaan Peternakan Sapi Perah dalam Upaya Substitusi Impor Susu. Fakultas Peter-nakan. UNPAD. Sumedang.
- Rahayu, S., S. Kuswaryan dan A. Rusmana, 2000. Analisis Pemerataan Pendapatan Peternak Sapi Perah di Kabupaten Tasikmalaya. Fakultas Peternakan UNPAD. Sumedang.
- Sadikin I., 1992. Tingkat Pemerataan Pandapatan Petani Ayam Ras Pedaging di Kabupaten D.T. II Bogor. Makalah Seminar Nasional Teknologi

- Bioreproduksi. Fakultas Peternakan. Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto.
- Saragih, B., 1994. Pokok-pokok Pemikiran : Agribisnis Berbasis Peternakan dalam Era I Industrialisasi. Pusat Studi Pembangunan-an. IPB Bogor.
- Schickele, R., 1954. Agricultural Policy : Farm Program And National Welfare. University of Nebraska Press. Lincoln.
- Soehaji, 1992. Pembangunan Jangka Panjang Tahap I. Upaya Pemantapan Kerangka Landasan, Pokok Pemikiran Pembangunan-an Jangka Panjang Tahap II dan Konsepsi REPELITA VI Pembangunan Peternakan. Dirjen Peternakan Jakarta.
- Todaro, M.P., 1993. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Widodo, H.S., 1990. Indikator Ekonomi. Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.